

# Nahdlatul Ulama dan Kedaulatan *Nation-State* Indonesia

Muh. Ilham Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

## Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU) lahir secara resmi pada tahun 1926, tetapi didahului oleh cikal-bakal beberapa organisasi, yakni *Nahdlatul Tujjar*, *Tashwirul Afkar* dan *Nahdlatul Wathan*. Ketiga organisasi inilah yang melahirkan dan membentuk NU sebagai organisasi keagamaan, keislaman, dan kemasyarakatan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama (NU) dengan Aswaja sebagai basis ideologi memberikan kontribusi dalam menegakkan dan mengukuhkan kedaulatan *nation-state* Indonesia dari gempuran penjajahan imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme. NU yang dinakhodai pertama kali oleh K. H. Hasyim Asy'ari mempunyai sikap kebangsaan yang kokoh dan kuat dalam membela nusantara terhadap penjajahan imperialisme kolonial Belanda dan paham-paham keagamaan yang menghilangkan tradisi-tradisi yang telah tertanam kuat sejak dahulu dibawa oleh para penyebar ajaran Islam pertama kali. Sikap mempertahankan negeri dalam cengkeraman penjajah dan penindas oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para ulama lainnya, ternyata telah tertanam kuat dalam sanubari mereka sejak belajar dan memperdalam pengetahuan agama Islam di Mekkah.

**Kata Kunci** : *Nahdlatul Ulama, Aswaja, Imperialisme, Kolonialisme, Indonesia*

## A. Sejarah Sosial Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial-keagamaan tidak begitu saja lahir, tetapi ada situasi dan kondisi yang melahirkannya. Suatu organisasi bila dilepaskan

dari akar realitas sejarahnya, maka organisasi itu bersifat ahistoris. NU lahir secara resmi pada tahun 1926, tetapi didahului oleh cikal-bakal beberapa organisasi, yakni *Nahdlatul Tujjar*, *Tashwirul Afkar* dan *Nahdlatul Wathan*. Ketiga organisasi inilah yang melahirkan dan membentuk NU.

Masuknya *Verenigde Oost Company* (VOC) ke nusantara memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan sosial-politik dan sosial-ekonomi rakyat nusantara. Lahirnya *Agrarische Wet* 1870 yang salah satu isinya Gubernur Jenderal memberikan hak *erfpacht* 75 tahun kepada investor-investor yang ingin menanam saham di wilayah jajahan ini.<sup>1</sup> Zaman inilah dikenal dengan orde pintu terbuka, Gubernur Jenderal kolonial Belanda membebaskan para pemodal swasta dan internasional melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam negara ini. Zaman ini pula dikenal sebagai zaman liberal pertama.

Akibat kebijakan dan regulasi tersebut, *Nahdlatul Tujjar* (NT) lahir sebagai respon atas penjajahan ekonomi yang digencarkan oleh kolonial Belanda.<sup>2</sup> NT yang lahir dan tumbuh di wilayah “segitiga emas” Kediri, Jombang dan Surabaya (saat ini, daerah tersebut termasuk bagian dari wilayah Jawa Timur). Sejarah mencatat, bahwa daerah-daerah ini menjadi wilayah yang paling ramai dan terkenal sebagai kota bandar, kota niaga, dan kota industri di Asia. Oleh karena itu, pendirian pabrik-pabrik di wilayah ini berefek langsung terjadinya proletarisasi sehingga membangun sebuah badan usaha bergerak di wilayah pertanian yakni *syirkah al-Inan* menemukan momentumnya.

Sedangkan *Taswhirul Afkar* lahir pada tahun 1918 untuk

---

<sup>1</sup> Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 127.

<sup>2</sup> Nurul Huda (ed.), *Sekilas Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Jarkom Fatwa dan Pustaka Pesantren, 2004), h. 54.

mengajar dan mendidik anak-anak agar mampu menjaga nilai-nilai Islam yang tergerus dan tergusur oleh pendidikan Barat bercorak kolonial Belanda.<sup>3</sup> Lembaga ini juga dijadikan sebagai tempat pengajian dan bergaul-berdiskusi oleh para kiai yang kala itu belum ada lembaga formal-legalistik. K.H. A. Wahab Chasbullah dan K.H. Mas Mansoer terkenal sebagai pelopor dalam pendirian lembaga tersebut, tersebarnya pemahaman modernisme Islam Jamaluddin al-Afghani dari Mesir memberikan dampak bagi lembaga *Taswihirul Afkar*. Pemahaman keagamaan di antara kiai pun terbelah, apatah lagi K.H. Mas Mansoer mendalami pengetahuan Islamnya di negara yang terkenal dengan bangunan piramidanya, Mesir. Perbedaan pemahaman yang menuju konflik terbuka tak dapat dielakkan, K.H. A. Wahab Chasbullah keluar dan mendirikan NU sedangkan K.H. Mas Mansoer ikut bergabung dengan Muhammadiyah.

Adanya tiga lembaga yang mendahului dan menjadi embrio lahirnya NU tidak bisa dipisahkan dari sikap kebangsaan, pemikiran Islam dan ekonomi.<sup>4</sup> Begitu pula NU

---

<sup>3</sup>Kelompok ini pertama kali didirikan oleh K.H. A. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansoer di Surabaya, akan tetapi dalam perjalanannya terdapat konflik yang menyebabkan K.H. A. Wahab Hasbullah ikut mendirikan Nadlatul Ulama dan K.H. Mas Mansur ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Lihat Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 33

<sup>4</sup>Selain dari faktor di atas, ada juga faktor yang lain berkaitan dengan didirikannya NU dengan persetujuan K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Raden As'ad Syamsul Arifin (murid K.H. Khalil Bangkalan) pernah menceritakannya: "bahwa Hadratussyaikh di dalam menanggapi ide K.H. A. Wahab Hasbullah itu sangat hati-hati, ide itu hanya menjadi wacana. Sang Hadratussyaikh pun melakukan shalat isktiharah untuk emndapatkan petunjuk dari Allah swt., akan tetapi jawaban itu tidak "jatuh" di tangan Hadratussyaikh melainkan di tangan gurunya. Pada akhir 1924, maka diutuslah K.H. Raden As'ad Syamsul Arifin untuk mengirimkan sebuah tongkat ke Tebuireng disertai dengan seperangkat QS. At-Thaha ayat 17-23 yang berkaitan dengan mu'jizat Nabi Musa. Pada kesempatan kedua kalinya, pada akhir tahun 1925, K.H. Khalil Bangkalan kembali mengutus K.H. Raden As'ad untuk mengirimkan Tasbih lengkap dengan bacaan Yā Jabbar, Yā Qahhar. Lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Cet. III; Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 72-73.

lahir akibat respon penghapusan khilafah Turki dan serbuan kaum Wahabi ke Mekkah yang melarang membangun kuburan, ziarah kubur, membaca do'a dan kepercayaan terhadap wali. Para ulama, khususnya ulama dari pulau Jawa membentuk Komite Hijaz sebagai wadah untuk melakukan kritik terhadap penguasa Raja Ibn Sa'ud.<sup>5</sup> Perkembangan selanjutnya, Komite Hijaz ini berubah nama menjadi *Nahdlatul Oelama* (baca: Nadlatul Ulama) pada tanggal 31 Januari 1926 Komite.<sup>6</sup>

NU yang dinakhodai pertama kali oleh K.H. Hasyim Asy'ari mempunyai sikap kebangsaan yang kokoh dan kuat dalam membela nusantara terhadap penjajahan imperialisme kolonial Belanda dan paham-paham keagamaan yang menghilangkan tradisi-tradisi yang telah tertanam kuat sejak dahulu dibawa oleh para penyebar ajaran Islam pertama kali. Sikap mempertahankan negeri dalam cengkeraman penjajah

---

<sup>5</sup>Utusan menghadap ke Raja Saud, yakni K.H. A. Wahab Chasbullah dan Syaikh Ahmad Ghonaim al-Amirī al-Mishrī membawa surat yang isinya adalah: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Sa'ud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermazhab empat: Hanafi, Māliki, Syāfi'i dan Hanbali. 2. Memohon tetap diresmikannya tempat-tempat bersejarah karena tempat-tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizyran, dan sebagainya. 3. Memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ikhwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekkah maupun tentang Syaikh. 4. Memohon hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum tertulisnya Undang-undang tersebut. 5. Jam'iyah NU memohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Sa'ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul tersebut. Lihat Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 16.

<sup>6</sup>Pertemuan pembentukan organisasi ini dihadiri oleh beberapa kiai, seperti K.H. M. Hasyim Asy'ari (Jombang), K.H. A. Wahab Hasbullah (Surabaya), K.H. Bisyrī Syansuri (Jombang), K.H. R. Asnawi (Kudus), K.H. Ma'shum (Lasem), K.H. Ridwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H. Nahrowi (Malang), K.H. Ridwan (Surabaya), K.H. Abdullah Ubaid (Surabaya), K.H. Alwi Abdul Aziz (Malang), K.H. Abdul Halim (Cirebon), K.H. Muntaha (Madura), K.H. Dahlam Abdul Qohar (Kertosono), dan K.H. Abdullah Faqih (Gresik). Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 18.

dan penindas oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para ulama lainnya, ternyata telah tertanam kuat dalam sanubari mereka sejak belajar dan memperdalam pengetahuan agama Islam di Mekkah.<sup>7</sup> Konflik yang memperebutkan kota Mekkah, telah mengajarkan para *founding fathers* NU untuk mengambil sikap yang tegas kepada penjajah siapa pun dan di mana pun juga.

NU dilahirkan dan dibentuk untuk menyelamatkan tiap individu manusia dari perpecahan dan bersatu dalam menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* sebagaimana tercantum dalam *Qānūn Asāsī* sebagai berikut:

Marilah Anda semua dan segenap pengikut anda dari golongan para fakir miskin, hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama "Jam'iyah Nahdlatul Ulama" ini. Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga. Ini adalah *jam'iyah* yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan duri di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk memuaskan dan ajakan memikat serta *hujjah* yang tidak terbantahkan.<sup>8</sup>

Penggalan *Qānūn Asāsī* di atas, memperlihatkan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan mempunyai sifat memperbaiki, menyantuni dan menjadi duri

---

<sup>7</sup>Ajaran sikap kemandirian ini didapatkan dari Syekh Zaini Dahlan yang diangkat oleh Syarif Mekkah menjadi mufti Mekkah pada 1871. Syekh Zaini Dahlan mengambil sikap dalam perebutan hegemoni antara kesultanan Turki, imperealisme Inggris dan Perancis, serta ekspansi dinasti Saud dengan kelompok wahabinya terhadap kota Jeddah-Mekkah dan Madinah. Lihat Ahmad Baso, "NU 82 Tahun Silam", Majalah Peduli, edisi X/Tahun III/ Februari 2008, h. 17.

<sup>8</sup>Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 347.

bagi orang yang berbuat buruk. Penjajahan dan penindasan yang dirasakan oleh manusia nusantara kala itu, membuat para ulama dan para pengikutnya yang tergabung dalam wadah NU ini bergerak-berbareng untuk memerangi dan mengusirnya dari tanah air ini. Penghilangan akses sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-religio-budaya menjadikan bumiputera (*inlander*) sebagai pemilik sah negeri ini, miskin dan menderita. Hal ini diperparah dengan dikeluarkannya UU kewarganegaraan dengan pembagian strata sosial masyarakat yang justru tidak berimbang, yakni warga istimewa disandang oleh kaum kulit putih, warga dengan golongan dua diberikan kepada kaum Tionghoa dan kaum Arab, serta warga kelas tiga diberikan kepada kaum pribumi.

Hak dan perlakuan istimewa yang dilekatkan sendiri oleh dan kepada para penjajah kolonial Belanda berefek pada perlakuan semena-mena terhadap kaum pribumi, yang sebagian besar beragama Islam. Penjajahan serta penindasan yang tak kenal belas-asih membuat massa-rakyat patah-arang dan trauma untuk melakukan perlawanan secara sistematis, walaupun gelora kecil perlawanan terhadap penjajah sering digencarkan oleh para ulama beserta para santrinya.<sup>9</sup>Semangat “memanusiakan manusia” dan “merdeka di tanah sendiri” tak pernah putus bergelora hingga titik darah penghabisan. Perlawanan terus dilakukan dan diorganisasikan serta menjadikan pesantren sebagai wadah dalam melakukan latihan militer. Semangat perlawanan ini pulalah yang mewarnai para kiai untuk membangun dan mengorganisasikan para kiai dan pengikutnya dalam satu wadah, yang dikemudian hari dikenal

---

<sup>9</sup>Mengenai perlawanan rapi, sistematis dan terorganisir melawan penjajah, tetapi terus dipatahkan. Lihat Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920* (Yogyakarta: Bentang, Cet. III, 2005). Lihat pula Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Jawa 1912-1926* (Jakarta: Grafiti, 1989), h. 20.

dengan nama Nahdlatul Ulama (NU).<sup>10</sup>

## B. Gerakan Sosial-Keagamaan Nahdlatul Ulama

Terbukanya terusan Suez pada tahun 1869 membuat arus pelayaran menjadi lancar dan tidak memakan waktu lama, para pencaplok dan pengumpul sumber daya alam yang laku di pasaran dunia kala itu – seperti gula, tembakau – berdatangan disertai dengan para pasukan dilengkapi dengan senjata dalam misi 3 G (*Glory, Gold dan Gospel*) mensahkan dirinya sebagai penjajah atas negeri yang kaya akan sumber daya alam tersebut, termasuk nusantara. Pencaplokan itu pun, secara tidak langsung banyak memberikan perubahan dalam bidang keagamaan, yakni penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama ini sangat dibenci oleh para kiai beserta para pengikutnya, ketika Belanda memberlakukan “*Kerstening Politiek*” di bawah komando Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg (1906-1916) yang secara terang-terangan memberikan bantuan kepada misi Katolik dan Zending Protestan.<sup>11</sup> Singkat kata, para kiai bergerak dan berkumpul bukan hanya mengemban misi nasionalisme, akan tetapi juga faktor keagamaan, yakni membendung arus agama Katolik dan Protestan.

Pada tahun 1899, C.H. Daventer pernah menulis sebuah brosur yang berjudul *Een Eereschuld* (suatu hutang budi kepada rakyat Hindia Belanda) menjadi embrio lahirnya politik etis (*educatie, irigatie, emigratie*), sehingga pemerintah kolonial Belanda banyak mendirikan sekolah untuk kaum pribumi kelas menengah ke atas. Hal ini dilakukan untuk mendidik sekaligus penyedia tenaga kerja dalam mengisi posisi tenaga kerja terampil di pabrik-pabrik dan jawatan kereta api guna

---

<sup>10</sup>Kacung Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 16-21.

<sup>11</sup>Choirul Anam, *Ibid*, h. 23.

meminimalisasikan biaya yang ditanggung oleh kolonial Belanda. Mengambil tenaga kerja terampil dari negara Belanda untuk mengisi lowongan di pabrik dan jawatan hanyalah meningkatkan anggaran belaka dibandingkan dengan membuka lembaga pendidikan untuk dijadikan tenaga kerja upahan murah. Terbukanya sekolah-sekolah, seperti *Kweekschool* (sekolah guru), maka para pemuda bangsawan dapat mengecap pendidikan di tanah airnya sendiri dan banyak mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan keadilan sosial, persamaan hak dan kemerdekaan individu. Pengetahuan inilah, membuat para pemuda mulai melakukan perlawanan secara sistematis, rapi dan terorganisasikan, seperti melakukan perlawanan lewat surat kabar, rapat umum, boikot dan pemogokan, hingga pemberontakan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1926.

Sejarah mencatat, sebelum NU berdiri secara resmi telah berdiri organisasi-organisasi yang melakukan perlawanan bertubi-tubi oleh para kaum pergerakan, seperti Sarekat Islam yang didirikan Oleh Haji Samanhudi dan Tirtoadisoerjo, Budi Utomo, Indische Partij yang didirikan oleh tiga serangkai (Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Surjaningrat). Akan tetapi, organisasi yang paling terkenal dengan gerakan radikal-konfrontatif adalah Sarekat Islam, khususnya Sarekat Islam cabang Semarang atau biasa dikenal dengan nama Sarekat Islam Merah, yang dikemudian hari tergabung dalam Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Sneevlit, kemudian Semaun, Darsono, dan kemudian diteruskan oleh Tan Malaka.<sup>12</sup> Perlawanan ini mencapai

---

<sup>12</sup>SI cabang Semarang menjadi gerakan radikal akibat penetrasi yang dilakukan oleh Sneevlit— orang pertama yang membawa ajaran Marxisme ke nusantara. Sisi lain, Semaun yang berhasil merebut pimpinan SI cabang Semarang, kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat (SR), kemudian menjadi Perhimpunan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pertama

klimaksnya dengan terjadinya pemberontakan Prambanan pada tahun PKI 1926, walaupun Tan Malaka (sebagai ketua umum kala itu) telah memperingatkan untuk tidak melakukan pemberontakan karena massa-rakyat belum sepenuhnya terbangun dari tidur panjang ketidaksadarannya atas penindasan.

Sebelum NU berdiri, banyak para ulama dan santri bergabung dengan gerakan Sarikat Islam sebagai wadah perlawanan terhadap penjajah, hingga terjadi pemberontakan Prambanan tersebut. Hampir sebagian besar para ulama dan santri yang terlibat dalam pemberontakan itu ditangkap dan ada juga yang dibuang ke tempat terpencil, seperti dibuang ke Boven Digoel, dan ada juga yang di usir dan dilarang untuk menginjakkan kaki di tanah airnya sendiri.<sup>13</sup>

Pasca pemberontakan tersebut, perlawanan terus dilancarkan, walaupun dengan gerakan kecil dan tersebar di mana-mana, hingga membuat gerah dan mengancam kedudukan penjajah atas wilayah jajahannya. Oleh karena itu, kolonial Belanda membuat sebuah siasat atas bantuan Snouck Hurgonje dengan menyusun kebijaksanaan atas aliran dan organisasi Islam dengan membagi dua kelompok, yakni Islam religius dan Islam politik. Kelompok pertama, adanya sikap toleransi kepada kolonial Belanda, maka organisasi dibiarkan terus hidup dan berkembang sedangkan pada kelompok kedua yang tidak toleran terhadap kolonial Belanda, maka akan disingkirkan karena mengancam kedudukannya.

---

di Asia Tenggara di bawah kepemimpinan Sneevlit. Lihat Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, h. 52-55.

<sup>13</sup>Pembuangan dan penangkapan aktivis PKI oleh kolonial Belanda ke Boven Digoel atau ke luar negeri, menurut data 13 ribu orang ditangkap, 4. 500 orang dikirim ke penjara setelah diadili dan 1. 308 orang dikirim ke digoel. Lihat Pramoedy Ananta Toer, *Roman Sejarah Rumah Kaca* (Jakarta: Lentera Dipantara, Cet. VII, 2009). Bandingkan Takashi Shiraishi, *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 93-96.

Tiarapnya sebagian para kaum pergerakan atau dikenal dengan masa Gerakan Bawah Tanah (GBT), NU lahir dan mengembangkan sayapnya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang dikategorikan sebagai kelompok pertama, maka organisasi ini pun mendapatkan pengesahan dari Belanda pada tahun 1930.

Pasca Nahdlatul Ulama (NU) disahkan oleh kolonial Belanda, maka organisasi ini pun berperan sebagaimana organisasi sosial-keagamaan yang lainnya. Tidak ada kegiatan yang mencolok di masa Gerakan Bawah Tanah (GBT) ini, begitu juga dengan organisasi-organisasi radikal yang para aktivis dan penggiat organisasinya melakukan "tiarap" karena adanya penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang.

Sebelumnya, para pemuda yang memekikkan kemerdekaan Indonesia, khususnya pelajar yang bersekolah di Belanda, kembali ke tanah air dan mendirikan *Studie Club*, pada kala itu terkenal nama Ir. Soekarno sebagai ketua *Studie Club* Bandung. *Studie Club* ini tergabung banyak pelajar, yang dalam perkembangan selanjutnya kelompok ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah komando Ir. Soekarno. Semangat kaum muda dalam diri pemuda Soekarno bersama PNI-nya pun berteriak lantang mengenai perlunya kemerdekaan penuh dengan pemerintahan berdaulat yang dipimpin sendiri oleh rakyat Indonesia.

Walhasil, dengan teriakan lantang itu, pemuda Soekarno pun ditangkap dan dibuang ke pulau Sumatera. PNI sebagai partai radikal yang berani mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah Hindia Belanda, kocar-kacir dan berantakan akibat hilangnya sang pemuda revolusioner, Soekarno. PNI akhirnya menjadi partai terpecah menjadi beberapa partai, di antaranya Partai Rakyat Indonesia di bawah pimpinan M. Tabrani didirikan pada tanggal 14 September 1930, Partai Indonesia (PARTINDO) di bawah pimpinan Sartono, didirikan pada bulan April 1931, dan

Golongan Merdeka/Club Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), yang didirikan oleh Sutan Syahrir dan M. Hatta.

Sebelum kedatangan fasis Jepang, para kaum pergerakan dapat dipetakan menjadi dua kelompok berdasarkan strategi perlawanannya terhadap pemerintah, yakni bersikap kolaborasi dengan pemerintah atau bersikap extra-parlementer dalam mengusir dan menegakkan pemerintahan yang berdaulat. Terkotak-kotaknya para pejuang kemerdekaan dalam kubu parlementarian dan extraparlamentarian, pertikaian dan konflik di antara pemuda dan pejuang bangsa tak bisa dielakkan. Saling intrik pun terjadi.

Pada tahun 1933, Adolf Hitler beserta partai Nazi di Jerman, Jepang melakukan agresi di bawah panji fasismenya serta Italia di bawah komando Mussolini juga bergerak di bawah panji yang sama. Ketiga negara fasis ini membentuk *Pakta AS* (Berlin-Roma-Tokyo) sebagai pakta (menolak) komunis dan ingin berkuasa atas seluruh dunia.<sup>14</sup> Melihat situasi internasional ini, maka pada kongres ke-VII Partai Komunis seluruh dunia di Moskow mengeluarkan pernyataan untuk membuat front rakyat anti-fasis yang biasa dikenal dengan slogan "*garis Dimitrov*". Garis Dimitrov ini menyatakan bahwa kader-kader komunis di mana saja mesti bersahabat dengan kolonial Barat untuk "*menghabisi*" negara fasis, dengan semboyan *kanan-kiri bersatu hancurkan fasis*.

Konsep dasar kebijakan garis Dimitrov ini membuat para kader PKI-ilegal yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) buatan Amir Sjarifuddin melakukan kerjasama dengan kolonial Belanda untuk menahan berkuasanya fasisme Jepang yang sudah hampir datang ke pulau Jawa. Gerindo mengeluarkan inisiatif pada bulan Mei

---

<sup>14</sup>Imam Soedjono, *Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI* (Yogyakarta: Resist Book dan Yayasan Sapu Lidi Belanda, 2006), h. 47.

1939 mendirikan federasi yang terdiri dari beberapa elemen dan partai politik tergabung dalam GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dengan programnya yakni perlunya *Volksraad* (Dewan Rakyat) diubah menjadi parlemen yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat, perlunya kepala-kepala departemen diganti dengan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Singkat kata, GAPI ini adalah gerakan pra-parlemen pertama yang dibuat oleh inisiatif para pejuang untuk mengangkat martabat Indonesia.

NU sebagai organisasi keagamaan yang juga berkarakter sosial juga tidak ketinggalan dalam berjuang mempertahankan kedaulatan tanah air, ini terbukti ketika kolonial Belanda memberlakukan ‘Ordonansi Guru 1923’, ordonansi ini diberlakukan secara menyeluruh pada tahun 1932 yang memuat bahwa aparat pemerintah berhak mengintervensi sekolah-sekolah swasta, berhak membatasi para guru agama, dan memberikan keleluasan kepada kepala adat untuk mengatur urusan agama Islam.<sup>15</sup> Beberapa campur tangan Belanda kepada Umat Islam “memerahkan-kuping” NU dan mengambil jarak oposisi dalam menentanginya. Meningkatnya kesadaran sosial di dalam tubuh NU, sehingga dari tahun ke tahun, banyak individu atau kelompok yang bergabung dengan *jam’iah* ini. Peningkatan jama’ah pun tak terelakkan, seperti misalnya pada muktamar ke-12 tahun 1937 di Malang, berjumlah 84 cabang, dan bergabung tiga cabang di Sumbawa besar dan Palembang. Sedangkan ketika Jepang datang, terjadi peningkatan drastis mencapai 120 cabang di seluruh Indonesia.

### C. Nahdlatul Ulama Mengokohkan *Nation-State* Indonesia

Tampilnya tokoh muda NU dekade tigapuluhan, seperti

---

<sup>15</sup>Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Cet. III; Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 96-97.

K.H. A. Wahid Hasyim dan K.H. Mahfudz Siddiq dalam pentas nasional dapat diartikan terjadinya pergeseran ke orientasi politik.<sup>16</sup> Terbentuknya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) pada tahun 1937 merupakan langkah nyata dari orientasi politik ini, di mana NU mempunyai posisi dominan dan berpengaruh dalam lembaga ini. Begitu pun selanjutnya keputusan-keputusan dalam muktamar (1938, 1939, dan 1941) menghasilkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda melalui pengajuan tuntutan, baik berkaitan dengan keagamaan maupun tidak.

Perhatian utama kepada masalah-masalah sosial-politik dalam tubuh NU, membuat pemerintah Hindia Belanda memberikan catatan tersendiri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak mau taat dan patuh, dibandingkan dengan organisasi lainnya, seperti Muhammadiyah, al-Irsyad, dan sebagainya. Hal ini bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama dikesampingkan, hanya saja persoalan sosial dan Indonesia diberikan porsi lebih besar. Hal ini untuk membuat umat Islam leluasa menjalankan ajaran agamanya, jikalau tanah tempatnya berpijak dijajah oleh bangsa lain. Mengusir penjajah itu bagian dari upaya menegakkan ajaran Islam sebagaimana adagium yang terkenal dalam tubuh NU, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Hal ini dibicarakan dalam muktamar ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin yang menyatakan bahwa negara yang dikuasai oleh penjajah tetap termasuk negara Islam, makanya harus tetap dipertahankan. Adapun redaksinya mengatakan:

(مسألة ي) كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ... فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيرُ دَارَ  
إِسْلَامٍ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ

---

<sup>16</sup>A. Gaffar Karim, *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 1995), h. 52.

بِاسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُولِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَحَيْثُ نَزِدِ فَتَسْتَمِيتُهُ دَارَ حَرْبٍ  
 صُورَةً لَا حُكْمًا فَعَلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي (جاكرتا) بِلْ وَعَالِبْ أَرْضَ جَاوَا دَارَ إِسْلَامٍ  
 لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْكُفَّارِ

Artinya:

Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinnya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang ditandai berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan ummat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan “daerah perang” hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah ‘daerah Islam’ karena ummat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir.<sup>17</sup>

Seiring perjalanan waktu, kuatnya penindasan oleh kolonial Belanda membuat para elit politik pun mulai menggelingsuarakan “Indonesia Berparlemen”. Slogan ini pertama kali disuarakan oleh NU yang dominan dalam perjalanan MIAI.<sup>18</sup> Selanjutnya, MIAI pun bergabung dengan GAPI dalam menuntut Indonesia Berparlemen. Slogan ini terus disuarakan hingga Jepang menginjakkan kakinya di bumi pertiwi.

Belanda menyerah setelah dikepung oleh angkatan laut Jepang dan secara sah Jepang pun melakukan okupasi terhadap

<sup>17</sup>Tim Pengurus Wilayah Lajnah Ta’lif wa Nasyr (PW LTNU) NU Jatim (peny.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2004 M)*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU, cet. III, 2007), h. 176-177.

<sup>18</sup>MIAI didirikan oleh K. H. A. Wahab Hasbullah, K. H. A. Dahlan Ahyad (NU), K. H. Mas Mansoer (Muhammadiyah), dan W. Wondoamiseno (Syarikat Islam) di pondok pesantrena Kebondalem Surabaya pada tanggal 18-21 September 1937. Lihat Chairol Anam, *op. cit.*, h. 102. Lihat pula Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), h. 114.

Indonesia. Menurut Ben Anderson,<sup>19</sup> ketika kedatangan Jepang di ibukota Jakarta, ada 3 (tiga) kelompok pemuda yang gencar melakukan perlawanan yakni *pertama*, pemuda di asrama Fakultas Kedokteran yang terletak di Jalan Prapatan 10, satu-satunya sekolah tinggi buatan Belanda yang diizinkan beroperasi pada zaman okupasi fasisme Jepang. Kelompok pemuda ini dikoordinatori oleh Sutan Sjahrir. *Kedua*, pemuda yang bertempat-tinggal di asrama angkatan baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa hukum yang dikoordinatori oleh Chaerul Shaleh dan Sukarni. Asrama ini didirikan oleh Hitoshi Shimizu dengan tujuan untuk menciptakan inti dari aktivis-aktivis pemuda. Akan tetapi di sisi lain, asrama ini juga menjadi tempat persinggahan, bergaul, berkumpul dan berdiskusi dengan pemuda yang sudah berpengalaman, seperti B.M. Diah, Adam Malik dan Tjokroaminoto. *Ketiga*, pemuda yang bertempat tinggal di asrama Indonesia merdeka, sedikit banyaknya telah diberi bantuan oleh Laksamana Tadashi Maeda. Pemuda ini dipersiapkan untuk menyusup ke kubu komunis dan anti-Barat.

Ketiga kelompok pemuda ini, dipersatukan dalam satu rapat yang melahirkan organisasi Gerakan Rakyat Baru (GRB) yang dikoordinatori oleh empat tokoh didalamnya, yakni Soekarno, Hatta, R.A.A. Wiranatakusumah dan Wahid Hasyim. Seiring perjalanan waktu, GRB terjadi perdebatan sengit antara kubu pemuda dan kubu tua dalam pembuatan piagam GRB mengenai harus disisipkannya kata “Republik Indonesia”, akan tetapi kubu tua cuma menginginkan kata “Republik Indonesia” ditulis dalam kurung,<sup>20</sup> mengingat pembicaraan akan hal

---

<sup>19</sup>Ben Anderson, *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946* diterjemahkan oleh Jiman Rumbo dengan judul *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 61-66.

<sup>20</sup>Lihat *ibid*, h. 80.

tersebut belum pernah dibicarakan kepada para petinggi Jepang. Sikap hati-hati dan 'menunggu' baik-hati dari Jepang lebih terlihat dibandingkan sikap pemuda yang revolusioner-nasionalis. Konflik kaum muda dan kaum tua pun semakin runcing, ketika kaum tua berjalan lamban dalam menyiapkan kemerdekaan hasil pemberian dan penyerahan Jepang yang tergabung dalam PPKI,<sup>21</sup> maka kaum muda "di bawah komando" Wikana pun melakukan gebrakan luar biasa yakni menculik Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok dan memaksanya membacakan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Singkat kata, para pemuda revolusioner menciptakan peristiwa yang dikemudian hari sangat bermanfaat bagi masa depan negara ini.

Organisasi NU, diakui atau tidak, mempunyai peranan cukup besar membawa massa-rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan secara *de facto*. Beberapa bulan setelah kedatangan Jepang, maka dikeluarkan pula peraturan *Saikerei* (upacara penghormatan pada kaisar dengan cara membungkukkan badan), orang yang pertama kali menolaknya adalah K.H. Hasyim Asy'ari yang juga termasuk pendiri NU. Begitu pula atas prakarsa K.H. Abdul Wahid Hasyim melakukan lobi dengan Jepang, agar organisasi sosial-keagamaan dibiarkan tetap melakukan aktivitasnya, dan pemerintahan Jepang menerimanya. Konsep *yahannu* (menghadapi lawan bukan menghadapi kawan) sebagai salah satu strategi politik NU diperlukan *rule of game* dalam

---

<sup>21</sup>PPKI adalah dibentuk sebagai pengganti Badan Penyelidik yang akan mempercepat segala usaha berhubungan dengan persiapan yang penghabisan guna membentuk pemerintah Indonesia Merdeka, yang didalamnya terdapat Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, BPH. Poerbojo, dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Andi Pangeran, IGK. Pudja, SH., dr. Mohammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Pandji Soeroso, BPKA. Soerjohamidjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Abbas, SH., Laturharhary, SH., AA. Hamidhan, Abdul Kadir, dr. Soepomo, KH. Wahid Hasjim, Teuku Mohammad Hassan, SH., Dr. GSSJ. Ratulangie dan Drs. Yap Tjwan Bing. Lihat *ibid*, h. 86.

menghadapi Jepang.<sup>22</sup> Sikap lunak dan kompromistis yang diperlihatkan NU kepada Jepang bukanlah dalam sikap oportunistis, melainkan untuk tujuan mengembangkan nilai-nilai Islam yang kala itu semua organisasi Islam dilarang untuk melakukan aktivitasnya. Masuknya K.H.A. Wahid Hasyim sebagai *Jawa Hokokai* sebagai upaya dalam melihat perkembangan gerak-gerik militer fasis Jepang yang membawa slogan 3 A (Jepang cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia), agar dapat diterima oleh massa-rakyat Indonesia.

Masuknya beberapa aktivis NU dalam jajaran menteri kabinet pasca-kemerdekaan memperlihatkan bahwa NU tidaklah bisa dilepaskan dari sejarah *nation-state* perpolitikan Indonesia. Berdirinya Masyumi menjadi partai Islam satu-satunya adalah hasil muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 07-08 November 1945, dan organisasi yang bergabung adalah NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Rancunya sistem organisasi dalam Masyumi terlihat dalam tumpah-tindihnya kerja-kerja organisasi sehingga konflik antar organisasi yang tergabung di dalamnya mencuat dengan sendirinya. Konflik ini pun menjadi salah satu keluarnya NU dari Masyumi.<sup>23</sup>

Setelah keluar dari Masyumi, NU mengajak Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Indonesia (Perti), Darul Da'wah wal Irsyad (DDI) Sulawesi Selatan dan

---

<sup>22</sup>Chairul Anam, *op. cit.*, h. 125.

<sup>23</sup>Ada beberapa alasan NU keluar dari Masyumi, yakni *pertama*, NU kecewa terhadap Masyumi atas inisiatif memberikan jabatan menteri Agama kepada Fakih Usman dari Muhammadiyah, padahal NU adalah organisasi yang terbesar di Indonesia dan sesuai dengan mayoritas umat Islam. Kedua, K.H. A. Wahid Hasyim melihat bahwa banyaknya anak muda berkiprah di politik mesti diberikan ruang gerak yang luas, maka diperlukan NU membuat partai politik. *Ketiga*, konflik dalam partai Islam Masyumi semakin menajam, dengan keluarnya beberapa organisasi. Lihat A. Gaffar Karim, *op. cit.*, h. 57.

Persyerikatan Islam Tionghoa wilayah Makassar untuk bergabung dalam Liga Muslimin Indonesia.<sup>24</sup> Berselang beberapa hari pembentukannya, NU pun mendirikan partai Nahdlatul Ulama dan mendapatkan suara terbanyak ketiga sesudah PNI dan Masyumi. Hal ini mengindikasikan bahwa partai NU mempunyai dukungan massa yang kuat di pedesaan Jawa tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan dengan menempatkan 45 wakilnya duduk di DPR, serta empat jabatan menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian, Menteri Agama dan Wakil Perdana Menteri II.

Massifnya pertarungan ideologi kapitalisme dan komunisme berimbas pada sikap politik presiden Soekarno, apakah memilih kapitalisme atau komunisme? Sejak semula, presiden Soekarno berjuang melawan kapitalisme dan menolak imperialisme, maka dalam kondisi semacam ini, presiden Soekarno pun kembali mengukuhkan sikapnya dengan memilih demokrasi terpimpin sebagai jiwa demokrasinya massa-rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin adalah:

Demokrasi adalah musyawarah...kita tidak menginginkan otokrasi...tidak mesti separuh lebih satu selalu benar, tidak mesti separuh plus satu selalu menang. Tidak, tidak sama sekali! Demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi hanya sekedar salah satu alat kebijaksanaan, satu cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang bijak dalam persoalan-persoalan sosial dan kenegaraan. Satu cara, satu cara yang kita sepakati bersama: Demokrasi kita, seperti yang sering saya katakana, adalah demokrasi dengan kepemimpinan. Sebuah demokrasi dengan kebijaksanaan dan tidak sekedar voting...Demokrasi bukanlah mayokrasi, atau lebih jelasnya, demokrasi kita bukanlah berarti mayokrasi karena kita harus

---

<sup>24</sup> Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi dan Pencarian Wacana Baru* (Cet. VII; Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 60.

tetap memegang musyawarah dan bukan sekedar voting.<sup>25</sup>

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka diawalilah dengan Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.<sup>26</sup> Para kabinetnya, terdapat faksi-faksi yang dominan, yakni faksi Partai Komunis Indonesia dan faksi Militer Angkatan Darat. Terjadinya perebutan dan konflik kekuasaan untuk “menjadi faksi kepercayaan” Presiden Soekarno tak terhindarkan hingga terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Terpukul mundurnya faksi PKI dengan dituduhnya sebagai dalang pemberontakan tersebut, membuat Militer Angkatan Darat di bawah naungan Bapak Soeharto leluasa melakukan gerakan anti-komunismenya hingga Presiden Soekarno jatuh. Masa ini, beberapa bagian NU yang sedari dulu tidak menyukai hubungan NU dekat dengan PKI melakukan gerakan anti-komunisme.

K.H. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU dalam era Demokrasi Terpimpin sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno dengan beberapa argumen perlunya Demokrasi Terpimpin diterapkan di NKRI, diantaranya:<sup>27</sup>

... فاذا اختلفتم فعليكم بالسواد الاعظم مع الحق واهله

Artinya:

*Kalau kalian berdua berbeda pendapat maka pakailah suara yang terbanyak disertai kebenaran dan keahlian (orang memberi usul).*

---

<sup>25</sup>Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 233-234.

<sup>26</sup>Pramoedya Ananta Toer mengatakan tercetusnya Demokrasi Terpimpin ala Soekarno tidaklah dapat dilepaskan dengan pergolakan perang dingin antar negara kapitalis dan negara komunis, hal ini sangat diperlukan supaya tidak salah menilai keputusan Presiden Soekarno. Lihat Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), h. 49-59.

<sup>27</sup>Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 82.

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا  
يَخْرُصُونَ

Terjemahnya:

*Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.*

كلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته

Artinya:

*Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang penguasa adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya di hadapan Allah.*

Adapun kaidah-kaidah yang dijadikan filsafat politik NU, sebagai berikut:<sup>28</sup>

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا (اخف الضررين)

Artinya:

*Jika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil.*

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.*

الضَّرَّارُ لَا يُرَالُ بِالضَّرِيرَارِ

Artinya:

---

<sup>28</sup>Suadi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris* (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 115.

*Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu bahaya lain.*

Inilah beberapa kaidah yang dijadikan sebagai filsafat politiknya, maka NU secara kasat mata dapat dikatakan “munafik”, tidak konsisten dan oportunis. Padahal sesungguhnya, sikap yang ditunjukkan oleh para elit dan ulama NU berlandaskan kaidah agama yang berorientasi kemaslahatan manusia seluruhnya. Perubahan NU kembali *jam’iah* adalah kembalinya eksistensi NU dari organisasi politik ke dalam bentuk asal, yakni organisasi sosial keagamaan. Perubahan ini dapat disaksikan, ketika berbagai ormas ingin memberikan gelar “Bapak Pembangunan Nasional” untuk Presiden Soeharto dan “Calon Presiden” periode mendatang, maka NU mengambil sikap dalam masalah ini, yakni:

Jabatan tertinggi pemerintahan negara adalah Kepala Negara, yang menurut UUD 1945 disebut Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, sedangkan menurut MPR adalah Mandataris, agar tidak mengurangi martabat jabatan tersebut, maka tidak diperlukan tambahan sebutan-sebutan lainnya. Adapun tentang pencalonan Presiden untuk tahun 1983 nanti, Munas berpendapat, hendaknya diajukan secara konstitusional dalam SU MPR hasil pemilu 1982 tepat pada waktunya.<sup>29</sup>

Era Orde Baru (ORBA) yang terkenal cenderung menganut ideologi kapitalisme-semu (*developmentalisme*) dengan segala regulasi, peraturan dan kebijakannya hanya diperuntukkan dalam pengejaran pertumbuhan ekonomi makro *an sich*, dengan anggapan bahwa jika pertumbuhan ekonomi telah meningkat maka akan terjadi *trickle down effect* (menetes ke bawah). Akan tetapi, dalam perjalanannya apa

---

<sup>29</sup>Tim Pengurus Wilayah Lajnah Ta’lif wa Nasyr (PW LTNU) NU Jatim (peny.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2004 M)*, *Ibid*, h. 3.

yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pemiskinan terus langgeng di kalangan mayoritas bawah mengalahkan pertumbuhan ekonomi di kalangan minoritas atas. Posisi ini, NU sebagai *jam'iyah*, *diniyah islāmiyah* dan *ijtimā'iyah* mengambil langkah-langkah yang bernuansa berseberangan dengan penguasa kala itu. Hal demikian juga dapat disaksikan di era ORBA dengan kepemimpinan K.H. Ahmad Siddiq dan K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Rais 'Am Syuriah dan Dewan Tanfidziyah pasca K.H. Idham Chalid.

Kepemimpinan Gus Dur menjadikan NU menjadi benteng terakhir kaum lemah dan dilemahkan oleh penguasa kala itu. Banyaknya program NU yang mengarah kepada penguatan sektor kelas lemah, khususnya petani dapat terlihat bagaimana Gus Dur melakukan kerjasama dengan Bank Summa untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi rakyat yang butuh pinjaman modal.<sup>30</sup> Kesempatan lain pun, Gus Dur melakukan kritik terhadap pemerintah yang memberikan monopoli satu perusahaan untuk melakukan usahanya, sehingga perusahaan lain tersingkir. Seperti, pemerintah hanya memberikan monopoli kepada maskapai Garuda dalam jasa penerbangan, sedangkan penerbangan lain dalam negeri tidak beri kesempatan untuk bersaing.

#### D. Penutup

*Pertama*, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial-keagamaan yang sejak lahirnya berasal gabungan dari *Nahdlatul Tujjar* (NT), *Tashwirul Afkar* (TA) dan *Nahdlatul Wathan* (NW) dengan orientasi membendung pedagang pribumi serta menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi

---

<sup>30</sup> M. Shaleh Isre (ed.), *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas dan Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKIS, 1998), h. 239.

rakyat kecil. Begitu pula *Tashwirul Afkar* dan *Nahdlatul Wathan* terlahir sebagai gerbong untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan soal keislaman dan kebangsaan. Ketiga gerbong inilah, maka NU meluncur dengan cepat dalam kemaslahatan publik. Sejumlah gagasan telah terlahir dari rahim NU untuk mewujudkan bangsa yang berperadaban, yakni teologi transformatif dalam menyebarkan dan mendakwahkan nilai-nilai Islam inklusif dan keindonesian, gagasan mempertahankan Indonesia dari penjajah kolonial Belanda, mengeluarkan resolusi Jihad untuk mempertahankan kembali Indonesia pada agresi militer Belanda, menerima gagasan Pancasila sebagai ideologi, mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tempat para petani mendapatkan modal dan ringan, serta aktif mengkampanyekan gagasan kemandirian ekonomi para kaum lemah dan dilemahkan.

*Kedua*, Sikap dasar Aswaja NU sebagai ideologi meliputi *tawassut* berarti sikap tengah yang menengahi dua kubu ekstrem yang saling bertentangan dan sikap ini dibarengi dengan *i'tidal*, agar pemecahan sebuah masalah menggunakan pertimbangan-pertimbangan sosiologis, psikologis, dan sebagainya. Kedua sikap ini dilandaskan oleh firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143 (*tawassut*) dan Q.S. Al Maidah/5: 8, Q.S. al-Nahl/16: 90 dan Q.S. an-Nisa/4: 58 (*i'tidal*). Serta *Tasamuh* adalah sebuah sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Sikap *tasamuh* ini disandarkan kepada Q.S. al-Baqarah/2: 258.

Sedangkan *tawa>zun* yakni sebuah sikap seimbang dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah swt, dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Seorang penganut NU tidaklah boleh hanya mementingkan hubungannya dengan sang Pencipta semata, akan tetapi harus juga memperhatikan hubungan horizontal antar manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitarnya.

Sedangkan yang terakhir, *amar ma'rūf nahī munkar* dapat diartikan sebagai sebuah sikap menyuruh kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Akan tetapi, dalam sikap *nahī munkar*, NU tidak menggunakan pendekatan frontal, tetapi bertahap dan pasti. Inilah lima prinsip sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan NU dalam membimbing dan memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih baik dan Islam menjadi agama yang *rahmah lil 'ala>mi>n*.

### Daftar Pustaka

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Cet. III; Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Anderson, Ben. *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946* diterjemahkan oleh Jiman Rumbo dengan judul *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Asyari, Suadi. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Baso, Ahmad. "NU 82 Tahun Silam", *Majalah Peduli*, edisi X/Tahun III/ Februari 2008.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-relasi dan Pencarian Wacana Baru*. Cet. VII; Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Gie, Soe Hok. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Yogyakarta: Bentang, Cet. III, 2005.
- Huda, Nurul (ed.). *Sekilas Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: Jarkom Fatwa dan Pustaka Pesantren, 2004.
- Isre, M. Shaleh (ed.). *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas dan Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKiS, 1998.

- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke khittah 1926*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mintz, Jeanne S. *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Muhajir, Ahmad. *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: LKiS, 2007
- Muzadi, Abdul Muchith. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Tim Pengurus Wilayah Lajnah Ta'lif wa Nasyr (PW LTNU) NU Jatim (peny.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2004 M)*. Surabaya: Khalista dan LTN NU, cet. III, 2007.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti, 1989.
- Shiraishi, Takashi. *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Soedjono, Imam. *Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Yogyakarta: Resist Book dan Yayasan Sapu Lidi Belanda, 2006.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Roman Sejarah Rumah Kaca*. Jakarta: Lentera Dipantara, Cet. VII, 2009.
- Wardaya, Baskara T. (ed.). *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.